



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI
PEMOHON DAN PEMERINTAH
(V)**

JAKARTA

RABU, 11 APRIL 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 50 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Andi Akbar Fitriyadi, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V)

Rabu, 11 April 2012, Pukul 14.17 – 15.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Moh. Mahfud MD. | (Ketua) |
| 2. Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3. Achmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 6. Harjono | (Anggota) |
| 7. M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 8. Muhammad Alim | (Anggota) |

Fadzlun Budi S.N.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Lodewijk F. Paat
2. Bambang Wisudo
3. Jumono
4. Andi Akbar Fitriyadi
5. Milang Tauhida

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Wahyu Wagiman | 3. Andi Muttaqien |
| 2. Emerson Yuntho | 4. Wahyudi Djafar |

C. Ahli dari Pemohon:

1. Abdullah Chaer

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Mualimin Abdi | 8. Wolter Siringoringo |
| 2. Suyanto | 9. Sumarno |
| 3. Andi Pangerang Moenta | 10. Sri Renani |
| 4. Ibrahim | 11. Mulyanto |
| 5. Didik Suhardi | 12. Bambang Hariyadi |
| 6. Hamid Muhammad | 13. Dadang Gandhi |
| 7. Hendarman | |

E. Ahli dari Pemerintah:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Slamet | 4. Ibrahim Musa |
| 2. Udin S. Winatapura | 5. Zamroni |
| 3. Indra Djati Sidi | |

F. Saksi dari Pemerintah:

1. Akhmad Solihin
2. Papa Riyadi
3. Agus Salim
4. Prastowo
5. Sukarno
6. Rahmi Djuli
7. Yanti Susanti

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.17 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli yang diajukan oleh pihak-pihak dalam Perkara judicial review Nomor 5/PUU-X/2012, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan kenalkan diri dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUTTAQIEN

Terima kasih, Yang Mulia. Pada persidangan kali ini, dari Pemohon ... Pihak Pemohon yang hadir saat ini adalah dari pojok sana Bapak Bambang Wisudo, kemudian Pak Jumono, Pemohon Prinsipal. Sebelah saya Pak Wahyudi Djafar, saya sendiri Andi Muttaqien. Kemudian, di baris belakang ada Bapak Andi Akbar Fitriyadi di pojok, kemudian Ibu Milang Tauhida juga Pemohon Prinsipal, serta ada Emerson salah seorang Kuasa Hukum. Kemudian, ada Bapak Lodewijk Paat di ... Pemohon Prinsipal juga, serta salah seorang Ahli yang mungkin belum di ... memberikan keterangannya pada sidang kali ini, Pak Abdullah Chaer.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Siapa?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUTTAQIEN

Abdullah Chaer.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sudah disumpah, belum?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUTTAQIEN

Belum, belum. Karena memang rencananya ingin mengikuti dinamika persidangan dulu untuk hari ini, Pak. Demikian, Majelis.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Oke. Kalau di pengadilan umum, orang mau jadi saksi itu ndak boleh menguping dulu. Tapi di sini boleh, ndak apa-apa.
Baik, Pemerintah?

8. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah hadir, Yang Mulia, akan saya sebutkan dari yang paling ujung karena yang paling senior. Prof. Dr. Suyanto, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar. Kemudian di sebelah kanannya ada Dr. Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah. Kemudian di sebelahnya lagi ada Dr. Didik Suhardi, Direktur Pembinaan SMP. Kemudian sebelahnya lagi ada Prof. Ibrahim Bafadal, Direktur Pembinaan Sekolah Dasar. Kemudian di sebelahnya lagi Prof. Dr. Anna Erliana, Beliau adalah Staf Ahli Menteri Bidang Hukum. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, Beliau adalah Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian di belakang ada Pak Dr. Hendarman, ada Pak Bambang Hariyadi, Pak Sumarno, Renani, Wolter Siringoringo, Dadang Gandhi, dan Mulyanto dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemudian, Yang Mulia, Pemerintah juga sudah menghadirkan sebagaimana pada persidangan yang lalu sudah disumpah semuanya dan baru mendengarkan satu orang saksi. Hadir di hadapan Yang Mulia, saya sebutkan, Yang Mulia. Prof. Dr. Slamet sudah hadir, Prof. Dr. Udin S. Winataputra sudah hadir, Dr. Ir. Indra Djati Sidi sudah hadir, Dr. Ibrahim Musa sudah hadir, Prof. Zamroni, Ph.D. sudah hadir. Yang berhalangan hadir Prof. Dr. Johannes Gunawan, Yang Mulia. Kemudian, Saksi Akhmad Solihin sudah hadir, Papa Riyadi sudah hadir, Prastowo sudah hadir, Agus Salim, kemudian Prof. Dr. Sukarno, kemudian Rahmi Djuli, dan terakhir Yanti Susanti, Yang Mulia.

Jika diizinkan pada persidangan hari ini, Pemerintah ingin mendengarkan keterangan para Ahli dulu, Yang Mulia.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ahli dulu, ya?

10. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Ahli dulu, Yang Mulia.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik.

12. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Dengan urutan yang pertama (...)

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Oke, nanti.

14. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Siap, terima kasih.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ini ada Saksi yang belum disumpah dulu. Sudah hadir, apa belum Agus Salim? Ada? Ada. Sulasim? Maju untuk ambil sumpah dulu. Ke sini-ke sini, ke depan, ini Saksi. Pak Anwar, silakan.

16. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Mohon ikuti saya.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

17. SEMUA SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM:

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

18. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Terima kasih.

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya, silakan. Kemudian, tadi yang diusulkan sebagai Ahli tambahan, Saudara Abdullah Chaer mana? Sini, Pak, maju, Pak. Ambil sumpah dulu, Pak. Ini Ahli, apa Saksi yang diajukan, Saudara? Saudara (Suara tidak terdengar jelas) sebagai Ahli, apa Saksi?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUTTAQIEN

Ini kami ajukan sebagai Ahli, Majelis.

21. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan. Agama ... Abdullah Chaer, Islam, Pak? Ya. Silakan, Pak Anwar.

22. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Mohon ikuti saya.

"Bismillahirrahmaaniirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

23. AHLI YANG BERAGAMA ISLAM:

"Bismillahirrahmaaniirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

24. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Terima kasih.

25. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya, silakan kembali ke tempat.

Sebelum memanggil Para Ahli, hari ini kami menerima surat dari Federasi Guru Independen Indonesia yang pada intinya memohon untuk menjadi Pihak Terkait. Oleh karena perkara ini sudah berlangsung lama, perkara itu sudah hampir selesai masuk lagi Terkait, hampir selesai masuk lagi Terkait, ndak selesai-selesai. Maka tadi kami memutuskan kita tidak akan menambah Pihak Terkait, tetapi Saudara dipersilakan untuk memberikan keterangan tertulis disampaikan langsung dan boleh hadir di persidangan bukan sebagai Pihak, sebagai pengunjung. Memberi keterangan saja secara langsung tertulis kepada Majelis Hakim, nanti kami catat sebagai ... apa namanya ... bukti ad informandum, ya. Tambahan keterangan di luar pemeriksaan-pemeriksaan resmi. Sehingga nanti perkara ini ada batasnya untuk selesai, tidak bersambung-sambung terus, gitu ya? Dan kalau melihat daftar saksi dan ahli yang masih tercatat di sini ada 16 orang, maka kira-kira ini sidang ini akan berlangsung sekurang-kurangnya 2 kali lagi, atau kira-kira 2 minggu . sehingga Saudara dari Federasi Guru ini dalam waktu 2 minggu silakan

menyampaikan bahan-bahan tertulis kepada Mahkamah Konstitusi secara langsung ke Kepaniteraan di lantai 4 gedung ini.

Baik, siapa yang akan hadir lebih dulu ini?

26. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya persilakan urutannya biar saya tidak usah sebutkan lagi.

Yang pertama, Prof. Dr. Slamet. Kemudian nanti yang kedua Dr. Ir. Indrajati, kemudian yang ketiga Dr. Ibrahim Musa, yang keempat Prof. Zamroni, dan yang terakhir nanti Prof. Dr. Udin S. Winata Pura.

27. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik.

28. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Silakan.

29. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan, Pak Slamet. Maju, Pak. Di ... Maju saja, Pak. Bapak dari Yogyakarta, ya?

30. AHLI DARI PEMERINTAH: SLAMET

Ya.

31. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya teman saya, dulu. Mengantar anak sekolah. Silakan, Pak.

32. AHLI DARI PEMERINTAH: SLAMET

Yang Mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Ibu, Bapak, semuanya yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb.

Saya sangat menyambut positif cara kerja demikian karena pada dasarnya tidak udah demo, gitu lho Pak. Tapi kalau melalui begini saya appreciate sekali. Andaikata semuanya begini, enak.

Yang Mulia Majelis Hakim, pembahasan SPI yang akan saya sampaikan ini maksud saya adalah memberitahukan mengenai sebagai saksi mencakup konsep dan implementasi sesungguhnya tetapi fokus kali ini cuma konsepnya karena yang di ... apa istilahnya, yang dipersoalkan oleh Para Pemohon pada dasarnya, apakah Pasal 50 ayat (3) itu bertentangan dengan Undnag-Undang Dasar atau tidak? Sehingga saya

tidak akan menyampaikan pengelolaan atau implementasi karena kemarin memang beberapa sekolah di ... minta sebagai saksi dalam pengelolaannya. Nah, kita punya 1110 sehingga (suara tidak terdengar jelas) juga ada juga sekian itu kasus-kasus kalau mau dirunut mengenai implementasinya.

Oleh karena itu, perkenankanlah saya membahas, kita fokuskan pada konsep saja. Apakah memang Pasal 50 ayat (3) Sisdiknas 2003 tentang SPI itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak?

Nah, oleh karena itu fokus dalam presentasi ini karena nanti juga masih ada Saksi/Ahli yang lain, saya fokuskan pada filosofinya.

Penyelenggaraan pendidikan selalu dituntut untuk pertama meningkatkan pemerataan kesempatan yang meliputi persamaan kesempatan, aksesibilitas, keadilan atau kewajaran. Lalu dua, meningkatkan mutu, relevansi, kolaborasi, dan juga daya saing. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi baik internal maupun eksternal.

Secara filosofis, SPI menganut pandangan eksistensialisme dan esensialisme sekaligus. Pandangan eksistensialisme menyatakan bahwa pendidikan harus mengembangkan eksistensi peserta didik dan bukan merampasnya. Eksistensi peserta didik berbeda-beda dalam dimensi jiwa dan raganya sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang memiliki perbedaan. Sehingga meskipun peserta didik diberi peluang yang sama, akan selalu ada perbedaan pencapaian prestasi belajar. Nah, pendidikan harus mampu menjamin keadilan atau kewajaran. Keadilan mengandung arti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang empunya. Jadi keadilan mengandung implikasi adanya perbedaan perlakuan menurut kondisi internal dan eksternal peserta didik, misalnya adalah adil atau wajar secara etis moral, jika peserta didik diperlakukan menurut kemampuan bakat dan minatnya.

Adalah adil pula jika demi membuka akses dan pemerataan kesempatan, peserta didik yang menonjol prestasinya dari daerah-daerah tertentu menurut standar kelompoknya diberikan peluang untuk mencapai suatu jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan hal yang sama juga berlaku untuk mengangkat status anak-anak yang kurang beruntung.

Kemudian pandangan esensialisme menyatakan bahwa pendidikan harus berfungsi untuk memajukan masyarakat bukan steril darinya dan karenanya harus selaras dengan kebutuhan, yaitu kebutuhan masyarakat baik, lokal, nasional, regional, maupun internasional. Kapanpun Indonesia sangat memerlukan peserta didik yang memiliki kecerdasan untuk mengelola kekayaan sumber daya di Indonesia yang sangat melimpah menjadi ... selain itu juga menjadi warga negara yang berjati diri Indonesia dan menjadi warga dunia yang secara proaktif ikut memajukan dunia. Tentu saja hal ini memerlukan SDM yang ... sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan sekolah bertaraf internasional, yaitu SBI itu merupakan salah satu wadahnya.

Dengan demikian, SBI memiliki semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebenarnya penyelenggaraan satuan pendidikan yang dirancang bermutu tinggi sudah diselenggarakan sejak Pelita I sampai sekarang. Dalam kurun waktu tersebut sejumlah istilah sekolah telah digunakan untuk menamakan sekolah-sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah yang bermutu tinggi bagi anak-anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Misalnya, dulu pernah dikenal sekolah unggul, juga sekolah plus yang pernah di ... apa kembangkan oleh Bapak Dr. Indra Jati waktu beliaunya direktur jenderal dan sekarang sekolah bertaraf internasional.

Yang perlu disampaikan di sini, Yang Mulia. Sekolah kita pada dasarnya kita kategorisasikan menjadi 3, yaitu adalah sekolah yang di bawah standar nasional pendidikan disebut standar pelayanan minimal, kemudian sekolah yang sesuai dengan standar nasional pendidikan yaitu SSN, dan sekolah yang telah melampaui standar nasional pendidikan disebut SBI. Nah, pengkategorian sekolah menjadi SBM, SSN, SBI bukan dimaksudkan untuk mengkastanisiasi sekolah, tetapi lebih dimaksudkan untuk memberi bantuan atau fasilitasi atau intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kategori sekolah. Jadi intervensinya tidak satu cara untuk semua atau satu ukuran untuk semua dalam bahasa inggrisnya adalah one size for all, tetapi lebih disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kategori sekolah yang bersangkutan.

Sekolah-sekolah yang telah dinyatakan sebagai RSBI harus melakukan upaya-upaya yang ... untuk melampaui SMP dan mencari pengayaan yang dilakukan melalui strategi patok duga atau benchmarking dengan sekolah-sekolah unggul atau sekolah-sekolah favorit baik dari dalam maupun luar negeri. Perlu disampaikan di sini, arti SBI masih banyak disalahartikan dan kemungkinan itu karena kurangnya ... apa ... komunikasi kebijakan secara merata kepada semua stakeholders dalam pendidikan, dan juga bisa juga karena kurang akurat dalam melakukan komunikasi kebijakan, bisa juga karena kurang konsisten dalam melakukan komunikasi kebijakan.

Oleh karena itu Yang Mulia, perlu saya sampaikan di sini bahwa SBI sekolah bertaraf internasional itu sama dengan standar nasional pendidikan plus pengayaan. Nah standar nasional pendidikan itu adalah itu jati diri Indonesia, itu adalah karakter ... karakteristik Indonesia, makanya sebenarnya SBI itu pada dasarnya yang pokok adalah standar nasional pendidikan plus tambahan. Nah tambahan-tambahan itu kenapa harus kita upayakan? Karena pada dasarnya pendidikan di Indonesia tidak steril dengan perkembangan global. Oleh karena itu kita tidak boleh "Katak di bawah tempurung" mengaku sudah hebat, tetapi sesungguhnya ketika kita benchmarking kita bandingkan dengan sekolah-sekolah dari negara maju kita kalah jauh. Oleh karena itu kita tidak tergolong orang yang sekedar hanya preservative melulu, tapi juga mempunyai budaya atau kultur progresif di mana standar nasional pendidikan plus tambahan-tambahan dan tambahan-tambahan itu kita

cari melalui benchmarking terutama adalah sekolah-sekolah yang lebih hebat dari Indonesia ini.

Nah karena sifatnya SBI sama dengan SMP plus pengayaan, sehingga pengayaan itu bisa ada, bisa tidak. Umpamanya kita punya standar nasional, umpamanya sebut saja matematika. Matematika itu di Jepang juga ada, di Amerika juga ada, di Inggris juga ada, sama-sama matematika SMP/SMA. Apakah matematika kita sama, lebih tinggi, atau kalah? Kalau memang kita sudah lebih tinggi, enggak perlu itu ditambahkan pengayaan, kalau sudah sama enggak perlu juga, tetapi kalau kita melakukan bandingan dengan matematika Amerika masih kalah, apa salahnya ketika kita mencoba untuk menambahkan?

Nah jadi, tidak benar kalau pendidikan ... apa ... SBI itu adalah berkiblat ke barat ... kepada negara barat, sama sekali tidak karena pada dasarnya adalah standar nasional pendidikan plus tambahan dan tambahannya tidak harus ada. Sudah saya katakan tadi, kalau memang kita sudah lebih tinggi ya bahkan sama, ya enggak perlu kita tambah, ngapain? Tapi kan kita tidak boleh in (suara tidak terdengar jelas) looking, inbreeding, tidak boleh kita mengaku tahu sendiri bahwa kita sudah hebat, ternyata setelah kita melihat kanan-kiri kita masih ... apa ... tertinggal. Nah, intinya di sini bahwa SBI tadi saya katakan tidak pernah kita berkiblat ke asing dan itu hanya sekedar pengayaan kalau ada.

Nah selain itu, Yang Mulia. SBI itu sebenarnya mengembangkan 360 derajat kebutuhan yaitu adalah pertama kebutuhan lokal, semua SBI disarankan untuk mengembangkan local genius atau istilahnya keunggulan lokal.

Jadi, SBI itu mengembangkan keunggulan lokal, bukan untuk dibandingkan tapi untuk kita ... kita sebar ke luar negeri. Nanti Bapak ... apa ... maksud saya, Yang Mulia bisa minta contoh umpamanya ada sebuah sekolah yang mengkomputerkan gamelan, sehingga lalu bisa kita ... apa istilahnya ... sebar luaskan ke manca negara, mereka jadi tertarik untuk mempelajari gamelan. Jadi, SBI harus mengembangkan muatan lokal dan itulah salah satu keunggulan komparatif yang tidak ada di dunia.

Oleh karena itu, tidak perlu kita membandingkan. Kalau kita punya gamelan satu-satunya di Indonesia, entah gamelan Sunda, gamelan Jawa, gamelan Bali, kita satu-satunya. Tidak perlu kita membandingkan, kita sudah nomor satu dan kita perlu, ibaratnya, menyebarluaskan.

Yang kedua, standar nasional. Semua SBI itu harus memenuhi persyaratan standar nasional. Diharapkan melampaui tetapi kalau kita itu menunggu sampai sekolah-sekolah itu melampaui, kita hitung, pernah itu hitung-hitungan dengan Pak Indra Jati, 50 tahun lagi barangkali, kalau semuanya diharapkan memenuhi karena dana kita terbatas.

Nah, oleh karena itu, dipilahlah beberapa sekolah dan akhirnya sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk menjadi RSBI itu, ternyata dia masih harus menambah berbagai standar-standar, baik itu standar

sarana-prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan karena pada dasarnya mereka masih memerlukan tambahan dana. Itulah sebabnya, semua sekolah yang sudah ditunjuk RSBI itu ada kenaikan biaya tetapi memang untuk melengkapi itu. Karena selama ini memang belum sempurna seluruhnya untuk menjadi RSBI.

Nah, standar nasional ada 8 yang mana Yang Mulia mungkin perlu sedikit saya sampaikan, ada standar kompetensi lulusan, standar isi atau kurikulumnya, kemudian standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana-prasarana, standar pembiayaan, standar proses, standar pengelolaan, dan juga standar penilaian. Nah, ini semua harus dilampaui oleh siapa pun yang menamakan RSBI. Dan sebelum dia ditunjuk menjadi RSBI diverifikasi dulu, apakah memang sudah memenuhi standar nasional pendidikan atau belum?

Kemudian yang ketiga, SBI itu juga harus tidak boleh steril dengan pengembangan regional. Kita punya ASEAN, kita punya APEC, kita punya SEAMEO, kita punya bermacam-macam lembaga supranasional yang kita tiap tahun itu adalah urun terus, andil uang tetapi kalau kita tidak bisa berkolaborasi dan bersaing sama mereka, akhirnya tiap tahun kita hanya urunan tapi tidak pernah memanfaatkan organisasi-organisasi supranasional yang saat ini mau tidak mau kita sudah kena dampaknya.

Nah, oleh karena itu, SBI harus bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan sekolah-sekolah di wilayah ASEAN, di wilayah APEC.

Yang terakhir, RSBI memang namanya sekolah bertaraf internasional, harus tidak boleh steril dengan perkembangan global.

Oleh karena itu, semua SBI itu harus memahami, menghayati, dan juga melaksanakan perkembangan-perkembangan global yang diinternalisasikan ke SBI. Nah, ini sudah bukan rahasia lagi karena berbagai perkembangan dunia, perkembangan global, itu kita sudah merasakan kalau kita tidak melakukan langkah-langkah proaksi, kita akan tertinggal dengan sendirinya.

Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa sekolah-sekolah yang seperti SBI itu di negara-negara mana-mana yang ini saya kaji dari internet, saya sudah download itu, ada semua. Di Malaysia, ada yang namanya Smart School (Sekolah Bestari) dan bahkan aku sudah kunjungan, SD, SMP, bahkan di sana sampai perguruan tinggi dan bahkan lagi, itu rapatnya tiap bulan dipimpin oleh menterinya langsung. Enggak tanggung-tanggung Malaysia itu. Dipimpin menterinya langsung, tiap bulan rapat, "Bagaimana kita mengembangkan SDM yang bisa bekerja sama dengan ... bisa bekerja sama dan juga bersaing secara internasional. Itulah sebabnya, banyak perusahaan asing seperti Blackberry yang terakhir ini, padahal konsumennya yang paling banyak di sini tapi letaknya di sana. Silicon valley, yang mestinya kita yang paling banyak menggunakan tapi juga letaknya di Malaysia karena SDM kita dianggap kurang begitu sesuai dengan harapan mereka.

Nah, juga tidak hanya cuaca, ini lebih berani lagi ini, Thailand ini. Disebut world standard class, padahal tidak ada standar dunia itu. Maaf sekali Para Pemohon kalau mengatakan standar world class standard tidak ada. Kita bertaraf itu artinya bahwa sekolah kita ini harus benar-benar ... bukan kita menyesuaikan tetapi kita ini harus ... hidup harus bergesek-gesekan. Kalau ada kehidupan lain yang lebih baik, dalam artian sekolah, kenapa kita tidak? Jadi, kita tidak mengatakan bahwa dalam konsepnya bahwa SBI itu harus menyesuaikan luar negeri. Itu salah sama sekali. Kita hanya memerlukan apabila memang kita kalah dan itu pun juga pada keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif itu kalau kita punya IPA, dia punya IPA, SMP-SMP dibandingkan, kita kalah? Ya, perlu tambah. Tapi kalau sudah sama, tidak. Tapi keunggulan komparatif, seperti kita punya kultur budaya yang luar biasa di negara kita, tidak ada di tempat lain, tidak perlu kita harus membandingkan. Kita sudah nomor satu dan kita kalau perlu harus menjual. Kasarnya begitu.

Nah, juga ini di negara-negara lain, tidak perlu saya bacakan Yang Mulia, ini di Filipina juga ada. Kemudian, juga di Hongkong juga ada quality school improvement, lalu juga bahkan Jepang pun merancang apa yang disebut dengan rainbow school, hebat lagi Jepang ini negara sudah seperti itu memang dia merasa bahwa SDM adalah satu-satunya sumber daya aktif yang lainnya pasif semua, tanpa campur tangan jasa sumber daya manusia, yang lain tidak ada artinya. Itulah beberapa contoh bahwa negara lain pun sudah bukan main.

Nah, Yang Mulia. Ini saya punya alasan-alasan, mengapa SBI Indonesia itu perlu ada? Banyak ... tapi ringkas-ringkas saja. Selain tadi sudah saya sampaikan bahwa SBI itu pada dasarnya untuk anak-anak di atas rata-rata. Dan karena itu memang tidak ... tidak layak kalau anak-anak apa di atas rata-rata diperlakukan seperti anak-anak yang mungkin kurang pintar, gitu. Itu adalah melanggar hak asasi manusia, kita harus memperlakukan sesuai dengan kodratnya perbedaan individu. Tadi, sudah saya sampaikan.

Yang kedua, pada dasarnya penyelenggaraan SBI memang sudah sejak awal direncanakan untuk bisa menghadapi era globalisasi, yaitu menyiapkan sumber daya manusia yang benar-benar tidak hanya mampu tapi juga sanggup untuk berkolaborasi, bekerja sama dan juga bersaing dengan negara-negara lain yang kita sudah bukan barang asing lagi, dimana di Indonesia kalau tidak menyiapkan diri, seperti Malaysia, seperti Singapore kita akan dilanda oleh sejumlah ribuan mahasiswa asing yang akan ke Indonesia, dan itu sudah diratifikasi dalam WTO karena saya juga tidak tahu kenapa dahulu salah satunya WTO itu adalah list-nya adalah pendidikan, yang harus diinternalisasikan, itu sebentar lagi kita tidak bisa menolak karena pada dasarnya, pada time, pada waktu saat itu kita tidak bisa apa-apa karena memang sudah, kita sudah meratifikasinya.

Nah, oleh karena itu Yang Mulia. SBI itu diadakan karena untuk menghemat devisa juga, data-data saya ini menunjukkan luar biasa. Yang di Malaysia ini kurang lebih 40.000, belum yang di Singapore, belum yang di Australia, berapa biaya yang kita buang ke luar negeri yang istilahnya capital flight-nya ke sana. Mahasiswa kita yang di Malaysia itu, mandi bayar, makan bayar, kencing pun bayar, gitu. Oleh karena itu, betapa kita itu, devisa kita yang keluar negeri. Oleh karena itu, marilah kita dirikan sekolah kita yang hebat di Indonesia itu supaya tidak saja untuk anak-anak kita, tetapi juga kalau bisa mahasiswa luar negeri, itu sekolah ke Indonesia memang kita mempunyai kelebihan-kelebihan yang mereka tidak punya.

Selain itu, Yang Mulia. Mungkin saya lompat terlalu banyak. Indonesia juga harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, bukan untuk sekedar globalisasi, tapi untuk bisa mampu mengelola sumber daya yang ada di Indonesia. Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang jumlahnya 230 sekian juta, itu kalau tidak dikelola dengan baik, beban. Tapi, kita juga punya sumber daya alam yang melimpah. Kita punya tanah yang subur, tetapi kok kita apel saja impor, kedelai impor, lalu beras impor. Kita itu mau bertani, mau beternak apa saja bisa, kok lembu sampai impor, kita juga lautan kita luar biasa, mutiara saja kok enggak bisa mengelola yang bisa mengelola malah orang Jepang. Mutiara terbaik di dunia itu adalah terkenal Jepang, tapi asalnya dari NTB, utara Lombok itu. Tidak hanya itu saja, tambang-tambang kita ini mestinya dikelola oleh anak-anak kita sendiri yang kita siapkan dengan matang. Tapi, dalam kenyataannya kita tahu semua bahwa sumber daya alam yang ... yang melimpah itu dikelola oleh orang luar negeri karena kita tidak menyiapkan dengan baik, atau memang ada unsur-unsur lain yang itu di luar diskusi kita saat ini, yaitu adalah mungkin kaitannya adalah dengan politik luar negeri.

Yang Mulia, penyelenggaraan SBI memang didasarkan pada Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, inilah yang dipersoalkan oleh beliau-beliaunya dari Pemohon, dan selain itu kembali lagi saya appreciate dengan critical, kritik berpikir kritis Anda karena demi bangsa, bukan kita menang kalah tidak, tapi demi bangsa. Saya pikir kalau cara-cara seperti ini ditempuh, kita akan damai seluruh Indonesia, dan ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan, kita taat apa yang diputuskan. Inilah cara-cara yang bagi saya, saya appreciate sekali.

Nah, Yang Mulia. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penting kiranya SBI dikembangkan di Indonesia, yang tentu saja harus berangkat dari kondisi dan kepentingan nasional saat ini, dan yang akan datang, yang mampu mempertebal nasionalisme dan yang mengembangkan keunggulan lokal, berdasarkan pilar-pilar kesatuan dan kesatuan Indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi, juga berbagai kebutuhan-kebutuhan nasional atau karakteristik nasional itu juga kita penuhi melalui SBI ini.

Pengembangan SBI diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas, berjati diri Indonesia, dan juga bisa berkolaborasi, dan berkompetisi secara sehat, baik pada tingkat regional, internasional, melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi kesetaraan, dan kepastian memperoleh layanan SBI.

Nah, secara umum itu Yang Mulia, dan ini ada beberapa butir lain yang nanti akan saya serahkan kepada Yang Mulia. Pada dasarnya pendirian SBI, pengembangan SBI punya visi-misi juga tujuan, tetapi semua yang ditulis di sini pada dasarnya adalah menginduk kepada visi-misi dan tujuan pendidikan nasional, tidak pernah kita akan menyimpang dari itu karena itu adalah titik tolak kita bangsa Indonesia.

Terakhir, Yang Mulia. Kita lebih dikenal sekarang ... eh, lebih mengenal istilah RSBI, ya. RSBI itu rintisan, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Kenapa Pemerintah menamakan RSBI? Karena memang pada dasarnya sekolah-sekolah yang ... yang ada itu memang kita rintis supaya menjadi SBI, kalau kita menunggu langsung ke SBI juga lama. Oleh karena itu, mari kita rintis dengan ukuran-ukuran yang sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan yang intinya adalah tetap saja itu adalah mengembangkan muatan lokal, jati diri Indonesia. Lalu diperkaya dengan muatan-muatan regional dan internasional yang dilakukan melalui benchmarking atau penyandingan, atau pem ... perbandingan dengan apa ... sekolah-sekolah yang lebih bagus dari kita, khususnya di luar negeri.

Sekali lagi, pengayaan bukanlah yang utama, tapi adalah standar nasional pendidikan yang pokok. Pengayaan itu kalau memang kita kalah, ya kita perkaya. Tapi pada bidang-bidang yang kita ada, mereka ada. Yang kita punya, mereka enggak punya, enggak perlu karena itu pendidikan kita sudah mempunyai keunggulan komparatif yang tidak ada di negara lain.

Indonesia adalah negara kaya raya yang tentu saja semuanya tahu. Tumbuh-tumbuhan, segala tumbuh-tumbuhan semuanya ada. Toh juga ilmu tumbuh-tumbuhan kok kita kadang-kadang kalah dengan barat. Hewan itu, kita itu jumlahnya luar biasa, di luar negeri hanya beberapa karena kalau musim dingin minus li ... 25 derajat pada mati, tapi di Indonesia itu tengu saja ada. Tengu saja ada di Indonesia itu. Bahkan sampai kesenian pun saya mengagumi Indonesia karena kita kesenian mulai Aceh sampai Papua ada apa ... ada apa-apa, tapi di barat cuma band saja. Kita ini Indonesia luar biasa, punya angklung, punya apa ... ya di Bandung itu punya. Bahkan ledek munyuk pun ada gitu di Indonesia itu. Mereka enggak punya itu ledek munyuk. Maaf sekali ya sang ... maksud ... maksud saya, Yang Mulia, ledek munyuk itu adalah kera yang menari gitu. Indonesia itu di perempatan jalan di Yogya ini Prof. Mahfud, ini kan su ... kalau pulang ke Yogya pasti juga masih kadang melihat ada. Luar biasa.

Oleh karena itu, Yang Mulia, sebagai akhir kata begini, sekali lagi saya sampaikan bahwa SBI sama dengan standar nasional, itu sebagai

jati diri Indonesia plus pengayaan atau mungkin pendalaman, atau mungkin penambahan kalau kita memang ndak ada, atau mungkin juga pendalaman. Akan tetapi itu tidak harus karena itu hanyalah merupakan penambahan pengayaan dan yang ditambahkan adalah ketika kita membandingkan yang kita punya, mereka enggak punya ... kita punya, mereka punya, tapi kita kalah, lalu kita mencoba untuk memperbaikinya.

Sementara itu saja, Yang Mulia. Demikianlah pandangan saya sebagai Saksi Ahli. Saya tidak mewakili universitas, tapi pribadi. Semoga pandangan ini dapat menjadi informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Saya pikir itu saja.

Saksi/Ahli ... saya sebagai Saksi/Ahli, barangkali nanti ada elaborasi tanya-jawab, dengan senang hati saya akan menjawabnya. Sekian, wassalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik. Berikutnya, Dr. Indra Djati Sidi. Silakan, Pak.

34. AHLI DARI PEMERINTAH: INDRA DJATI SIDI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang saya muliakan. Para hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kesaksian saya sebagai Ahli mengenai masalah yang diajukan dalam judicial review dan saya akan mengkombinasikan bacaan saya dengan beberapa data yang saya paparkan dalam bentuk power point.

Sebelum saya menyampaikan kesaksian dalam Perkara Nomor 5/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 ayat (3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perkenalkan lebih dahulu saya Indra Djati Sidi, Staf Pengajar Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung, NIP 195306051977101001. Dari tahun 1998-2005 bertugas sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.

Lanjut slide-nya. Lanjut, Pak. Mencermati hasil survei lembaga internasional pada tahun 2005 tentang daya saing bangsa kita Global Competitiveness Index, Human Development Index (HDI) dan income per Capita menunjukkan bahwa Indonesia menempati ranking 69 dari 125 negara dalam global competitiveness index, rangking 110 dari 177 negara dalam Human Development Index yang merupakan komposit index pembangunan, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan suatu bangsa dengan income per capita US\$1267.

Rangking negara-negara lainnya sebagai ilustrasi disampaikan dalam tabel 1, dari tabel 1 terlihat dengan jelas korelasi yang sangat

kuat antara daya saing suatu bangsa dengan index pembangunan bangsa dan income per capita bangsa tersebut. Index pembangunan suatu bangsa atau HDI ditentukan atas dasar penilaian 3 sektor pembangunan yaitu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Kita harus membangun pendidikan yang berkualitas yang dapat meningkatkan daya saing bangsa artinya pendidikan yang mencerdaskan yang kemudian akan meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan bangsa kita. Lanjut, ini lanjut dulu, lanjut.

Pada akhir Tahun 2003 saya meminta kepada Menkokesra, pada waktu itu Bapak Yusuf Kalla, dan Mendiknas Bapak Malik Fajar untuk melihat dari dekat bagaimana bangsa lain mendidik dan menyiapkan siswanya agar mampu bersaing dalam persaingan dunia global sekaligus menjamin eksistensi bangsanya. Kami bertiga melakukan kunjungan ke Jakarta International School (JIS) di Tenggarong, Jakarta. Jadi tidak perlu apa namanya ... kunjungan studi ke luar negeri cukup di Jakarta saja. Dari dekat kita melihat proses belajar mengajar yang terjadi berdialog dengan kepala sekolah dan guru, melihat saran pendukung seperti perpustakaan, laboratorium, auditorium, dan sarana olahraga, dan lain sebagainya.

Kita melihat bagaimana sesungguhnya para guru melakukan dialog-dialog dengan anak-anak, bagaimana anak-anak sungguh-sungguh dalam menerima pembelajaran, bagaimana ICT dimanfaatkan, bagaimana joyful learning, active learning dimanfaatkan di situ. Pertanyaan berikutnya bagi saya dan Pak menteri adalah bagaimana kita dapat memiliki sekolah-sekolah berkualitas lebih banyak lagi yang dapat akses oleh siswa-siswa kita yang tentunya mencerdaskan dan dapat mengangkat daya saing bangsa dalam dunia global yang pada akhirnya mensejahterakan bangsa, yang jelas sekolah seperti ini pasti tidak murah dan pada saat itu anggaran depdiknas belumlah 20%, dan berbagai masalah-masalah yang kita hadapi bukan hanya mutu tetapi berbagai tantangan yang ada. Tetapi kita harus berbuat dan melangkah, tidak bisa menunggu sampai semuanya sempurna baru berbuat, akan sangat-sangat terlambat.

Indonesia memang mempunyai situasi yang sangat unik, tantangan pembangunan pendidikan sangatlah besar dengan spektrum masalah yang luas jika diukur dari jenjang pendidikan masih banyak guru-guru kita yang belum mempunyai kualifikasi untuk menjadi pendidik yang kompeten, tadi balik lagi, ya. Ini adalah presentasi guru-guru bersertifikat pendidik terhadap jumlah guru, kita masih terbatas yang ikut sertifikasi sedang dilakukan.

Kedua, sisa guru belum memenuhi syarat disertifikasi masih ada kira-kira 861.000 guru, tantangan dari guru saya kita masih banyak. Lebih dari 20% guru-guru kita masih missed match. Artinya mengajar bukan pada bidang studi yang dikuasainya, di beberapa tempat masih ditemui kekurangan guru, sekolah-sekolah kita masih banyak yang

perlu direhabilitasi, dan seiring dengan bertambahnya penduduk sekolah-sekolah baru pun harus dibangun.

Tidak semua sekolah-sekolah kita mempunyai sarana, prasarana seperti laboratorium ataupun perpustakaan yang memadai. Belum lagi pengelolaan pendidikan dalam moda desentralisasi memberikan banyak tantangan yang harus diselesaikan dengan cepat antara lain capacity building pengelola pendidikan di daerah, dilain pihak kita sudah berhadapan dengan tantangan global yang tidak bisa dielakkan lagi artinya selain menyelesaikan berbagai masalah pendidikan yang ada kita juga harus menyiapkan peserta didik kita untuk dapat bersaing dalam dunia global meneruskan estafet pembangunan bangsa.

Sebenarnya anak-anak Indonesia telah dididik oleh banyak kurikulum Pak, jadi kita sebenarnya anak-anak Indonesia tidak hanya dididik oleh satu kurikulum. Banyak kurikulum pada kenyataannya luar dan dalam negeri, banyak putra-putri Indonesia mengikuti pendidikan di luar negeri seperti di Australia, Jerman, Amerika, Inggris, Jepang, dan lain sebagainya. Ketika mereka kembali ke Indonesia ijasah dan transkrip akademi mereka diteliti untuk kemudian diakui, diakreditasi oleh Depdiknas dengan berbekal pengakuan Depdiknas mereka dapat melanjutkan pendidikannya di Indonesia.

Hal ini merupakan praktik yang umum di dunia internasional, di dalam negeri pun sebagian dari anak-anak Indonesia mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Gontor atau yang sejenis, yang memiliki kurikulum yang berbeda atau KMI (Kuliatul Mu'alimin Al-Islamiah) berbeda dengan kurikulum nasional Alumni Gontor pun diterima, diakui diberbagai negara seperti Mesir, Saudi Arabia, Malaysia, dan negara lainnya. Oleh karena itu dengan melihat spektrum masalah pada saat itu tantangan bangsa, dana yang ada, situasi pendidikan kita, dan dunia global yang tidak bisa dielakkan maka berbagai kebijakan kemudian ditempuh untuk mulai membangun sekolah-sekolah berkualitas yang dapat memberikan kemampuan bagi anak-anak Indonesia bersaing dalam dunia global. Kebijakan tersebut antara lain membuka kesempatan bagi anak-anak Indonesia mengikuti pendidikan di sekolah internasional yang ada di Indonesia yang semula diperuntukan hanya untuk orang asing saja. Ini bagaikan sekolah di luar negeri tetapi lokasinya di dalam negeri.

Kita mulai berdialog dengan pondok pesantren, dengan Departemen Agama. Kita mengakui kurikulum KMI Gontor dan membentuk tim bersama Departemen Agama untuk mengakreditasi pondok pesantren lainnya yang mau bergabung seperti Gontor. Jadi kurikulumnya berbeda tapi standar kompetensinya harus tetap sama. Semenjak pengakuan ini minat terhadap pendidikan di pondok pesantren Gontor dan pondok-pondok lainnya melonjak dan alumninya tidak hanya melanjutkan ke perguruan tinggi agama tetapi juga perguruan tinggi umum lainnya antara lain ke ITB.

Membangun sekolah nasional plus, yaitu sekolah-sekolah dengan kurikulum nasional yang diberi muatan plus, seperti teknologi informasi dan komunikasi, desain, komunikasi visual, Inggris, dan lain sebagainya. Konsep ini pada umumnya diikuti oleh sekolah-sekolah swasta yang ada. Kenapa konsep ini kita laksanakan? Karena kalau kita memulai dari awal membangun sekolah baru, recruit new teacher dan semuanya, kita enggak ada uang, uangnya akan habis diserap untuk itu semua, tapi kita memanfaatkan yang ada, kita revitalisasi, kita tingkatkan untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak kita yang kemudian dilakukan continuous improvement.

Dan pada tahun 2006 pemerintah mulai membangun rintisan sekolah berstandar internasional. Semua kebijakan ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, untuk mencerdaskan bangsa, mengangkat harkat dan martabat bangsa, tetap berakar pada budaya bangsa, serta untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam percaturan dunia global, menunggu semuanya siap dan sempurna akan sangat-sangat terlambat. Kita perlu melangkah dan berbuat membangun sekolah-sekolah yang berkualitas yang dapat diakses oleh semua anak bangsa.

Penggunaan kata internasional bukan dimaksudkan untuk menghilangkan budaya bangsa atau karena kita tidak percaya diri atau ikut-ikutan kurikulum negara lain, melainkan untuk mengingatkan kita bahwa mutu pendidikan yang diberikan haruslah mampu memberikan kompetensi yang mencerdaskan peserta didik sekaligus dapat bersaing dengan mutu pendidikan negara mana pun tanpa menghilangkan jati diri bangsa. Lanjut itu ya mas, power point, ya, lanjut, ya.

Dalam berbagai kesempatan ceramah di depan kepala-kepala sekolah RSBI, saya menyampaikan bahwa nasionalisme dan pembangunan karakter adalah hal yang utama dalam proses pendidikan di sekolah-sekolah RSBI dan ini dilakukan oleh teman-teman di RSBI.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang Institut Teknologi Bandung kampus di mana saya bekerja yang dapat dibandingkan dengan masalah yang kita hadapi. Menurut for ICU (for International College University) ITB menempati rangking 138 dunia pada tahun 2011 dan rangking 16 Asia tahun 2012. Sebuah perguruan tinggi yang cukup mempunyai taraf tinggi atau bertaraf internasional. Dalam membangun ITB tidak hanya menggunakan rupiah murni dari APBN tetapi juga dari pinjaman lunak dan negara donor antara lain dari Bank Dunia, USCF, dan lain sebagainya. Tanpa suntikan dana pemerintah, pinjaman akan sangat berat ITB meningkatkan kapasitasnya. Saat ini pembiayaan ITB, lanjut mas.

Pada saat ini pembiayaan ITB (gambar 1) diperoleh melalui kombinasi dukungan pemerintah dan private financing. Private financing ini diperoleh dari lembaga pengabdian pada masyarakat ITB, Unit Usaha ITB, donasi-donasi, dan pada akhirnya orang tua mahasiswa. ITB terbuka untuk semua siswa melalui seleksi masuk, tidak ada diskriminasi.

Bagi mahasiswa tidak mampu disediakan beasiswa oleh berbagai pihak dari pemerintah, industri, alumni, pribadi, dan ikatan orang tua mahasiswa. Seperti inilah saya berharap RSBI itu dikelola.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. RSBI dibangun dengan konsep untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, yang berdaya saing, yang dapat diakses oleh siapa saja melalui proses seleksi. Dia menggunakan kurikulum nasional yang diperkaya. Tidak melupakan akar budaya bangsa, justru dalam era global ini nasionalisme dan jati diri bangsa harus diperkuat dan yang utama. Materi paparan saya dan ceramah akan saya lampirkan dalam persidangan ini.

RSBI justru bagian dari upaya pemerintah untuk mencerdaskan bangsa dengan benchmark yang jelas. Tetap menjaga nasionalisme dan karakter bangsa, pemerintah pusat dan daerah berkontribusi dalam pembiayaan RSBI tidak menyerahkan sepenuhnya pada masyarakat. Dia tidak boleh diskriminatif, berbagai skema pembiayaan bagi siswa tidak mampu telah dilaksanakan oleh sekolah-sekolah RSBI. Akan hal ini dapat dijelaskan oleh para saksi lapangan dengan rinci nanti.

Tidak ada masalah dengan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau English as a second language. Gontor dan berbagai pesantren telah menggunakan sejak lama bahasa Inggris dan bahasa Arab dalam proses belajar mengajar dan sama sekali tidak melunturkan nasionalisme atau jati diri bangsanya.

Akhirnya, Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Sebagai salah seorang dosen yang ikut menatar para kepala sekolah RSBI pada beberapa kesempatan saya melihat semangat dan antusiasme yang besar untuk mencapai mutu yang tinggi yang kita lihat dari capaian ujian nasional, olimpiade, lomba-lomba, atau melanjutkan ke perguruan tinggi terkemuka di dalam dan di luar negeri.

Saya melihat persaingan yang sehat antarsekolah dan capaian-capaian yang mengagumkan. Saya melihat kepercayaan yang besar dari masyarakat, banyak masyarakat yang datang ingin anaknya masuk di RSBI, dan dari tahun ke tahun jumlahnya meningkat, dan saya percaya para Pemohon pun juga anaknya berada di RSBI. Paling tidak dia ingin anaknya juga mendapatkan pendidikan yang berkualitas tadi, dan tidak diskriminatif, dan melihat mereka melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.

Sebagai contoh, pada semester ini saya mengajar Mekanika Bahan (strength of materials) di Prodi Teknik Sipil, FTSL (Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan) Institut Teknologi Bandung. 37 dari 147 mahasiswa yang masuk Prodi Teknik Sipil Tahun 2010 berasal dari SMA RSBI. Mereka datang dari berbagai kota, seperti Padang, Palembang, Serang, Tangerang, Jakarta, Semarang, Malang, Denpasar, bahkan ada yang dari Pontianak, belum termasuk mahasiswa yang berada pada prodi dan fakultas lainnya. Di ITB ada kira-kira 100 prodi dan 10 fakultas.

Kalaupun dalam tataran pelaksanaan masih dijumpai kelemahan, maka kelemahan tersebut kita perbaiki dan sempurnakan bersama. Kita melakukan continuous improvement, sehingga RSBI menjadi SBI yang disegani, yang menjadi andalan bangsa, yang dapat diakses oleh semua peserta didik. Saya melihat justru pada RSBI inilah siswa-siswa cerdas dari teman-teman kita yang kurang mampu mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Mereka tidak bisa mungkin masuk JIS, saya saja tidak mampu menyekolahkan anak saya masuk JIS, walaupun ditawarkan oleh kepala sekolahnya karena sangat mahal biayanya. Walaupun spektrum masalah pendidikan di Indonesia begitu banyak dan beragam, kita tidak boleh berhenti membangun sekolah bermutu, seperti RSBI atau pun sekolah-sekolah unggulan lainnya. Dengan semangat untuk membangun dan menegakkan eksistensi bangsa dalam kancah dunia global dengan berlandaskan tetap kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah ini harus selalu kita dorong, kita semangati untuk dapat menemukan pola pendidikan bagi anak-anak kita yang mampu, insya Allah menegakkan NKRI.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bersaksi dalam Majelis yang terhormat ini. Wassalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Terima kasih, Bapak Indra Djati. Kemudian, yang ketiga Bapak Dr. Ibrahim ... Ibrahim Musa.

36. AHLI DARI PEMERINTAH: IBRAHIM MUSA

Bismillahirrahmaaniirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, dan Anggota, para hadirin yang saya hormati. Perkenankan saya untuk menyampaikan keterangan mengenai ... pandangan saya secara akademik terhadap substansi uji materi Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan ini saya buat bertumpu pada hasil penelitian dan kajian tentang profil pembiayaan pendidikan pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang dikembangkan menjadi bertaraf Internasional di Surakarta dan Jakarta.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Untuk memahami profil pembiayaan pendidikan, para satuan pendidikan dasar yang dikembangkan menjadi bertaraf Internasional seakan menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, latar belakang pembiayaan pendidikan. Dalam literature, paling tidak ada konsepsi. Ada dua konsep tentang pendidikan, yaitu pendidikan sebagai investasi dan pendidikan sebagai konsumsi.

Pendidikan dikatakan sebagai investasi karena melalui pendidikan, seorang memperoleh kompetensi yang digunakan sebagai modal untuk meningkatkan penghasilan di masa yang akan datang. Biaya pendidikan merupakan investasi yang akan menghasilkan keuntungan secara ekonomi dan nonekonomi dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan perolehan dari bunga bank. Ini konsep dasar perhitungan ekonominya.

Pendidikan dikatakan juga sebagai konsumsi. Karena melalui pendidikan, seseorang bukan sekadar memperoleh kompetensi untuk modal kerja, tapi juga untuk mendapatkan kepuasan waktu memenuhi mata pendidikan, kemudian kebanggaan selama mengikuti pendidikan. Malahan untuk tingkat pendidikan dasar, program pendidikan dinggap sebagai hak asasi, dan kewajiban negara untuk memelihara dan mengembangkan potensi, dan pribadi anak bangsa, sehingga menjadi program wajib belajar. Itulah dasarnya wajib ... wajib belajar itu merupakan kewajiban dari pemerintah.

Terlepas dari anggapan bahwa pendidikan sebagai investasi atau pun konsumsi, pendidikan merupakan kegiatan produksi kompetensi yang dilakukan oleh peserta didik dengan menggunakan sumber daya pendidikan yang mencakup sumber belajar, yaitu guru, kurikulum, bahan ajar. Kemudian sarana dan fasilitas belajar, yaitu ruangan tempat belajar, komputer, sarana praktik, laboratorium, dan perpustakaan, serta dukungan administrasi dan manajemen.

Untuk menyediakan layanan pendidikan yang bermutu sebagai prestasi ataupun konsumsi, diperlukan dukungan sumber daya pendidikan yang memenuhi persyaratan standar nasional pendidikan seperti dinyatakan ... dicantumkan dalam Undang-Undang (suara tidak terdengar jelas) Tahun 2003 Pasal 35. Yang merupakan jaminan agar dapat terjadi proses pembelajaran yang efektif, produktif, menyenangkan, dan memberdayakan peserta didik.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Persyaratan pembiayaan pendidikan bagi penyelenggaraan pendidikan sebagai investasi dan konsumsi dengan standar nasional atau pun standar internasional, mempunyai implikasi terhadap sistem pendanaan pendidikan. Selain untuk menjamin mutu layanan pendidikan pada tingkat suatu pendidikan, sistem layanan pendidikan harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam penyediaan, pengalokasian, penggunaan, dan pengelolaan dana pendidikan. Yaitu dari ... ditegaskan dalam Undang-Undang (suara tidak terdengar jelas) Tahun 2003 Pasal 47, Pasal, 48, dan Pasal 49.

Prinsip keadilan berupa kebijakan tentang keberpihakan dan keringanan bagi masyarakat yang kurang mampu dalam pendanaan pendidikan. Prinsip kecukupan berupa kebijakan tentang dana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pendidikan sesuai standar nasional pendidikan.

Prinsip berkelanjutan adalah sistem pendanaan pendidikan yang menjamin keberlangsungan proses pendidikan sehingga peserta didik dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi mengacu pada sistem pengelolaan dan penggunaan dana pendidikan yang menjamin dicapainya hasil pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis (suara tidak terdengar jelas) maupun finansial.

Sistem pendanaan pendidikan yang sesuai dengan upaya untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, serta memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kecukupan, keberlanjutan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengadaan, pengalokasian, penggunaan, dan pengolahan pendanaan menuntut perlu dikembangkannya rumus pendanaan pendidikan yang visioner. Rumus pendanaan pendidikan yang visioner memuat komponen pembiayaan dan satu pembiayaan pendidikan yang memungkinkan dicapainya mutu layanan dan kegiatan pendidikan sesuai standar nasional, serta memudahkan penggunaannya oleh penyelenggara pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dan pengelola pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tentang bagaimana mengembangkan rumus pendanaan? Karena ini dengan memahami konsepnya rumus ini, baru kita bisa memahami mengapa biaya pendidikan bertaraf internasional harus seperti itu?

Ada dua pendekatan yang dapat dipakai dalam pengembangan rumus pendanaan pendidikan. Pendekatan pertama, bertolak dari kemampuan penyediaan dana pendidikan secara historis. Historical funding formula, dengan menggunakan jumlah peserta didik, headcount (hitung per kepala) sebagai dasar pengalokasian dana pendidikan kepada setiap satuan pendidikan.

Aplikasi dari rumus pendanaan pendidikan berdasarkan pendekatan historis dan jumlah peserta didik menyatakan dalam bentuk alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja untuk investasi dan operasional, yang kita sebut namanya line item budgeting sudah dirinci, biaya operasional dirinci berdasarkan jenis pengeluaran berupa gaji upah pegawai, belanja barang dan jasa, pemeliharaan gedung dan peralatan, dan belanja perjalanan.

Walaupun pendidikan berbasis pengeluaran, menimbulkan kesulitan dalam mengidentifikasi komponen pembiayaan mana yang mempengaruhi kinerja pendidikan secara signifikan. Informasi tentang kurangnya dana operasional, misalnya personalia atau nonpersonalia, tidak dapat secara langsung menjelaskan komponen biaya operasional yang mana yang menyebabkan kurangnya efektifnya penyelenggaraan pendidikan.

Untuk mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi komponen pembiayaan mana yang paling mempengaruhi kinerja pendidikan digunakan pendekatan pengembangan rumus terhadap pendanaan pendidikan berbasis kegiatan, yaitu pengembangan rumus pendidikan berbasis kegiatan yang dinamakan activity led funding formula yang menggunakan bobot pekerjaan penuh penyelenggara pendidikan berdasarkan persyaratan kurikulum pendidikan sebagai dasar pengalokasian dana.

Crunch [Sic!] Alexander dalam McMahan, mengenai bukunya, *Financing Education Overcoming in Efficiency and in Quality*, menyarankan agar dalam menyusun rumus pendanaan yang berkeadilan, perlu menggunakan pendekatan berbasis kegiatan yang memenuhi persyaratan;

- a. Kecukupan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pokok pembelajaran.
- b. Pemerataan antarsekolah.
- c. Upaya penyeragaman fiskal untuk mengatasi perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat.
- d. Penyelenggaraan program pendidikan khusus dan program remedial.
- e. Faktor diseconomy soft skill, seperti kecilnya jumlah peserta didik karena letak geografis terpencil.
- f. Kemampuan pemerintah yang terbatas.
- g. Perbedaan tingkat kemahalan antarwilayah.

Rumus pendanaan pendidikan berbasis kegiatan disusun berdasarkan asumsi akan hubungan fungsional antara kegiatan pokok pendidikan, sarana pendidikan, satuan harga pendidikan, dan kebijakan tentang mekanisme pendanaan dalam kegiatan produksi pendidikan. Penyelenggaraan kegiatan pokok pendidikan atau kegiatan belajar-mengajar, kemudian penyelenggaraan ekstrakurikulum ... kulikuler, pemberian bimbingan, pengawasan, tidak akan optimal jika tidak didukung dengan sarana pendidikan sesuai standar pelayanan minimal. Sarana pendidikan yang bermutu dapat diperoleh jika memenuhi syarat biaya satuan pendidikan sesuai harga barang dan jasa di pasar secara nasional atau pun regional.

Berdasarkan hasil studi dan simulasi, biaya satuan pendidikan untuk SMP sesuai standar nasional pendidikan dengan siswa 300 orang, 12 rombongan belajar, kurikulum pendidikan menggunakan sistem kredit semester yang 120 semester adalah Rp8.730.000,00 untuk per anaknya atau sekitar US\$940 per siswa per tahun, yaitu untuk biaya penyelenggaraan kegiatan pokok pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan. Biaya tersebut menjadi Rp9.900.000,00 atau sekitar US\$1.100 jika ditambah dengan biaya untuk beasiswa siswa miskin dan dana kompensasi mutu berupa biaya remedial. Biaya satuan ini kurang dari 25% biaya satuan SD negeri di Chicago, Amerika Serikat, yang efisien pada tahun 1995, yaitu sekitar US\$4.845,49, dengan gaji guru

US\$37.914,52 per tahun atau sekitar US\$3.100 per bulan, dengan siswanya, SD tersebut, siswanya 704.

Nah, ini dihitung dari hasil studinya Lena Safile [sic!] dan teman-temannya yaitu measuring school efficiency using school level data dalam ... di dalam school based financing dari (suara tidak terdengar jelas). Studi ini dilaksanakan pada tahun 1997 kalau tidak salah, ya. Biaya satuan pendidikan untuk sampai di kota adalah seperti dilakukan dalam tabel berikut hanya di sana kurang jelas, tapi di sini dari tabel ini dapat kita ketahui bahwa tadi itu gaji ... untuk komponen gaji gurunya yaitu Rp3.600.000,00, kemudian untuk sarana pendidikan Rp1.670.000,00, kemudian penunjang KBM, kemudian tata usaha dan operasi administrasi Rp1.540.000,00, kegiatan ekstrakurikuler Rp1.092.000,00, jumlahnya Rp8.073.000,00, ditambah dengan biaya kompensasi kemiskinan yaitu Rp540.000,00, per siswa. Kemudian, untuk biaya remedial yaitu Rp720.000,00, per siswa dengan jumlahnya Rp9.900.000,00.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah studi kasusnya, kalau tadi adalah gambaran tentang berapa biaya yang ... SMP saja setelah kita hitung pada tahun 2005 di Bali Bank, dan sekarang kita lihat kenyataan pada sekolah-sekolah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional.

Biaya penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 1 RSB Surakarta. Profil biaya satuan yang disajikan dalam sidang Mahkamah ini merupakan salah satu contoh biaya penyelenggaraan pendidikan pada SMP yang merupakan rintisan untuk dikembangkan menjadi berstandar internasional yang ada di kota Surakarta. Tujuan sajian adalah untuk memberikan perbandingan dengan biaya satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan. Data ini dikumpulkan langsung pada bulan ... pada bulan Desember 2011 pada tahun yang lalu.

Fasilitas pendidikan yang ada, struktur biaya pendidikan pada SMP Negeri 1 Surakarta yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional, mencakup biaya operasi personalia dan nonpersonalia seperti biaya untuk guru, sarana dan prasarana, dan kegiatan ekstrakurikuler. Fasilitas pembelajaran mencakup bahan bangunan ... bangunan, perpustakaan, buku ... seperti berikut, lahannya yaitu seluas 12 atau 1,2 hektare, 12.000 meter persegi atau per anaknya per anak per pegawai jatahnya 20,9 meter persegi. Lahan yang terbangun 3 koma ... 3.900 (suara tidak terdengar jelas) atau kira-kira 6 meter koma ... 6,38 meter persegi per siswa, lahan untuk fasilitas lapangan bermain, olahraga, sarana belajar 9.000 meter atau kira-kira 16,4 meter persegi per siswa, kemudian lahannya masih hak pakai dari pemda kotamadya.

Memperhatikan fasilitas pendidikan pada SMP Negeri I Surakarta, memang sudah mengenai SMP dan layak untuk dikembangkan menjadi bertaraf internasional. Tadi luas tanahnya 1,2 hektare untuk 550 siswa dst. dan ini kemudian dengan memiliki buku ... satu siswa memiliki 15

buku untuk 7 mata pelajaran, memiliki lab, dsb. Dan setiap ruangan mempunyai LCD sendiri.

Struktur biaya pendidikan. Struktur biaya pendidikan pada SMP Negeri I Surakarta, disusun berdasarkan struktur standar nasional pendidikan. SMP itu ada 8 standarnya, jadi ternyata dihitung berdasarkan struktur standar nasional pendidikan itu, ditambah standar lingkungan, dan standar biaya. Ini yang merupakan yang SMP plus X-nya. X-nya di sini adalah standar lingkungan dan standar budaya. Dua komponen struktur biaya pendidikan tersebut merupakan ciri khas dari SMP Negeri I Surakarta yang dikembangkan menjadi berstandar internasional. (suara tidak terdengar jelas) biaya pendidikan pada SMP Negeri I Surakarta adalah seperti dirangkum dalam tabel berikut.

Di sini standar isi, jadi biaya yang dipergunakan untuk standar isi itu Rp8.000.000,00. Untuk standar proses Rp296.000.000,00. Standar kompetensi kelulusan Rp207.000.000,00. Standar pendidikan Rp250.000.000,00 yaitu termasuk gaji di sini. Standar sarana-prasarana Rp1,2 miliar. Kemudian, standar pengelolaan Rp155.000.000,00. Standar pembiayaan, nah ini gaji guru, Rp2,4 miliar termasuk standar pembiayaan. Standar penilaian, Rp171.000.000,00. Standar lingkungan Rp114.000.000,00. Standar budaya Rp50.000.000,00, sehingga jumlahnya Rp5,7 miliar dan biaya satuan secara keseluruhan Rp10.377.000,00. Kalau dikeluarkan gaji gurunya, maka standar biaya operasi nonpersonalia adalah Rp5.700.000,00. Biaya satuan ini mendekati biaya satuan total, termasuk biaya untuk kompensasi kemiskinan dan kompensasi mutu yaitu Rp9.900.000,00 dibandingkan dengan SMP.

Jika dibandingkan dengan biaya satuan SMP dengan siswa 300 orang, (suara tidak terdengar jelas) pelajar yang memiliki lab IPA, lab bahasa, lab komputer, dan ruang serba guna yaitu Rp8.700.000,00, tidak termasuk biaya kompensasi kemiskinan, biaya satuan pada SMP Negeri I Surakarta yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional, memang sedikit lebih tinggi dari SMP. Hal ini sebagai konsekuensi dari adanya tambahan standar lingkungan dan standar budaya yang satuan di luar biaya untuk gaji guru juga sedikit lebih tinggi dibandingkan biaya SMP di kota yaitu Rp5.013.000,00 per siswa per tahun.

Majelis Hakim Konstitusi ... Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, yang berikut adalah kontribusi pembiayaan pendidikan. Ini kita akan melihat dari mana mereka mendapatkan sumber pendanaan. Sebagai satuan pendidikan yang dikembangkan untuk menjadi bertaraf internasional dan sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 41 ayat (1) bahwa tambahan biaya untuk investasi, biaya operasi personalia dan nonpersonalia pada satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan local, dapat bersumber dari: satu, penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. Dua, orang tua atau

wali peserta didik. Tiga, masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik. Empat, pemerintah. Lima, dari pemerintah daerah. Enam, dari pihak asing yang tidak mengikat. Dan tujuh, dari sumber lain yang sah.

Sumber pembiayaan pendidikan pada SMP Negeri I Surakarta adalah seperti dalam tabel berikut.

Secara keseluruhan, dana pendidikan yang ada atau yang digunakan pada SMP Negeri I Surakarta ini adalah Rp5,7 miliar, ini bersumber dari APBD kota yaitu (suara tidak terdengar jelas) Rp2,4 miliar. Kemudian, BKMKS yaitu Rp100.000.000,00. Jumlahnya adalah 44% jadi dua koma ... Rp2,5 miliar ini mewakili 45% dari seluruh anggaran, yang bersumber dari BOS, yang katanya BOS akan memenuhi semua biaya personel. Dari pusat itu Rp445.000.000,00, dari provinsi, Rp431.000.000,00, yang jumlahnya 15% jadi Rp343.000.000,00 per tahun atau sekitar 15%. Jadi, dana BOS itu baru hanya mencukupi untuk 15%. Kemudian, dari masyarakat yang akumulasi melalui komite sekolah, berupa sumbangan penerimaan awal tahun Rp662.000.000,00 atau 12%, dan bulanan yaitu Rp1,6 miliar atau 29%. Jumlahnya adalah Rp2,3 miliar, yang seluruhnya 41% dari seluruh anggaran yang bersumber dari masyarakat.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Yang ke empat adalah bea penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri Menteng 1 di Jakarta. Nah, ini contoh yang kedua, kalau tadi di SMP Surakarta Solo, kalau sekarang SMP Negeri Menteng 1, kalau enggak salah ini yang ... yang ikut mengajukan tuntutan itu, ini kalau enggak salah ini. Ya, bukan ya? Oh, sama Mentengnya ini.

Profil biaya satuan pendidikan yang disaj ... berikut adalah contoh yang kedua, yang saya lanjutkan pada fasilitas pendidikan. Sekolah Dasar Negeri Menteng 1, menempati satu unit gedung standar yang dipakai bersama dengan Taman Kanak-Kanak Negeri Besuki, dengan jumlah ruang kelas sebanyak 13 lokal, dan daya tampung siswa dengan ketentuan tentang rasio murid dan guru. Gedung SD Negeri Menteng ... Negeri Menteng 01, dibangun pada tahun 1934, kondisinya saat ini, bangunan utama, secara kondisi belum berubah, namun masalah kebersihan dan keindahan tetap ... gedung ini tetap terpelihara.

Fasilitas pembelajaran terdiri dari ruang teori, ruang kelas, 13 unit ruang kelas, ruang lab satu unit, perpustakaan satu unit, lab bahasa satu unit, ruang kepala sekolah satu unit, ruang guru satu unit, ruang komputer satu unit, ruang koperasi sekolah satu unit, jumlah siswa 417 orang terdiri dari 13 ruang belajar. Guru tetap 19 orang, dan guru honor 6 orang, didukung oleh 9 tenaga administrasi.

Struktur biaya pendidikan, struktur biaya pendidikan SMP Negeri 1 Jakarta, disusun berdasarkan struktur kegiatan pokok ... di struktur biaya pendidikan ini dapat dilihat langsung seperti di dalam tabel 4. Dari data tabel 4 ini, diketahui bahwa jumlah dana yang ada pada SD Negeri 1 ini adalah Rp3,2 miliar dan biaya per siswa per tahun adalah Rp7.700.000,00. Biaya satuan operasional ini lebih rendah, dari biaya

satuan hasil simulasi untuk SMP di kota, yaitu Rp8.073.000,00 per siswa per tahun.

Ini nanti akan saya sampaikan, bagian yang berikutnya adalah kemampuan ... kemampuan kita membiayai pendidikan gratis karena banyak yang dipersoalkan ... yang dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan gratis. Dalam euforia kebebasan kampanye politik, kita menyaksikan janji-janji muluk para politisi untuk menyelenggarakan pendidikan dasar, bahkan hingga pendidikan menengah gratis. Namun dalam kenyataannya, setelah terpilih menjadi wakil rakyat, atau pun kepala pemerintahan, janji tersebut sulit untuk dipenuhi terutama apabila ingin melaksanakannya sesuai biaya satuan pendidikan, yang memenuhi ketentuan SNP. Dari hasil studi simulasi, rumusan satuan pendidikan dan fakta di lapangan, kebutuhan daya yang diperlukan sebagai pendidikan dasar gratis, jauh dari ketersediaan dana.

Pada tahun 2011, PDB kita ada Rp7,125 triliun. Anggaran penerimaan belanja negara tahun 2011 tersebut, yaitu Rp1,124 triliun, anggaran pendidikan 20%, yaitu sekitar Rp127 triliun. Sedangkan kebutuhan dana bagi penyelenggaraan pendidikan untuk Rp26.800.000,00, anak SD. Kemudian, Rp12.200.000,00, untuk anak SMP/Tsanawiyah, jumlahnya adalah sebesar Rp416 triliun. Dan dana ini untuk memenuhi dana penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar yang gratis tersebut, diperlukan anggaran sebesar 3 ... 5,8% dari PDB atau 35% dari APBN dan APBD.

Majelis Hakim Konstitusi Yang ... Yang Mulia. Kesimpulan dan rekomendasi, dengan mengacu pada hasil analisis di ... tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertama, bea penyelenggaraan ... biaya penyelenggaraan RSBI masih dalam kerangka struktur biaya pendidikan berdasarkan SNP. Yang kedua, tidak ada liberalisasi pendidikan di SBI. Pemerintah dan pemerintah daerah, membiayai sesuai dana yang tersedia dan masyarakat membantu dalam pendanaan sesuai keinginan akan mutu layanan pendidikan yang bertaraf Internasional.

Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, tidak melarang ketentuan pembukaan dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Masalah yang sesungguhnya bukanlah liberalisasi pendidikan (suara tidak terdengar jelas) pendidikan SBI, tetapi rendahnya alokasi dana pendidikan untuk mengenai SNP. Berdasarkan keterbatasan anggaran, salah satu alternatif untuk menjamin ketersediaan kecukupan dana bagi penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar sesuai SNP yang sepenuhnya dibiayai oleh negara, perlu terapkan pajak pendidikan sebagai bagian dari pajak kekayaan secara progresif yang memayungi peran serta masyarakat dalam pendana pendidikan dasar dalam rangka wajib belajar.

Pajak pendidikan secara progresif adalah penetapan pajak dengan tarif yang beda, baik keluarga yang berpenghasilan kecil atau yang mempunyai kekayaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari, seperti keluarga prasejahtera dimana mereka tidak akan dikenai pajak pendidikan.

Di pihak lain bagi yang mempunyai penghasilan tinggi, memiliki kekayaan yang besar, akan dikenai pajak pendidikan yang tinggi. Dengan demikian, akan ada jaminan bahwa masyarakat miskin akan mendapatkan pelayanan pendidikan secara gratis karena biaya pendidikan mereka ditanggung melalui pajaknya orang kaya.

Di negara maju seperti Amerika Serikat, biaya pendidikan wajib belajar 12 tahun dari TK sampai kelas XII ditanggung bersama oleh pemerintah federal, pemerintah daerah, dan masyarakat di tingkat distrik. Biaya pendidikan oleh masyarakat di tingkat distrik dilaksanakan dengan penerapan pajak kekayaan profit tax secara progresif yang ditetapkan oleh dewan pendidikan distrik, yang dipilih oleh rakyat secara langsung, bahkan kepala dinas pendidikan school distrik ... school district superintendence dipilih oleh pendidikan distrik, bukan ditunjuk oleh gubernur.

Mekanisme pendana pendidikan ... pendidikan dasar gratis seperti ini, tentu dapat kita la ... terapkan di Indoneisa. Jika Amerika bisa, tentu kita bisa, asalkan kita memiliki kesadaran, kemauan, keikhlasan untuk berpihak kepada kepentingan rakyat yang banyak.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, demikian penjelasan saya. Lebih-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik Para Pihak, Pemohon dan Pemerintah, serta Para Saksi dan Ahli, sedianya kami menjadwalkan bisa sekurang-kurangnya sampai lima orang pada hari ini untuk berbicara, tapi tadi tidak bisa kita hentikan karena masalahnya berkaitan antara satu statement ke statement berikutnya. Sehingga sidang hari ini harus diakhiri sampai di sini karena sebentar lagi kami juga ada sidang lain, ada sidang Pleno juga. Ini yang ... para pihak yang lain sudah menunggu di luar ruangan ini untuk segera menggantikan pada kasus berikutnya.

Nah untuk yang akan datang, kami dari Majelis Hakim mengusulkan agar setiap Ahli yang tampil itu rata-rata 10-15 menit saja, gitu. Jadi, pada pokoknya kalau bicara soal apa ... perimbangan pendidikan, biaya pendidikan gitu disampaikan saja, kalau sekolah ini sekian, ya kalau ini sekian, lalu kesimpulannya apa, pengaruhnya terhadap pemerataan dan kesempatan pendidikan, gitu. Datanya tentu penting, tetapi biasanya kami baca sendiri. Bapak cukup pointers-nya saja, hal-hal pokoknya. Lalu data, angka dari pernyataan itu, kami biasanya ada membaca sendiri di dalam sidang tersendiri.

Baik, kalau begitu sidang berikutnya akan dibuka lagi pada hari Selasa, tanggal 24 April 2012, pukul 11.00 WIB. Jadi pukul 11.00 WIB, agak pagi, tidak seperti biasanya yang kita ambil sore. Pukul 11.00 WIB untuk melanjutkan mendengar keterangan Ahli dan Para Saksi yang ...

yang diajukan oleh Pemerintah maupun dari Pemohon tadi. Cukup, ya?
Dengan demikian sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.37 WIB

Jakarta, 11 April 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.